****

**LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED**

**UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH SUMATERA BARAT**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. By Pass Km 24 Anak Air Padang**

**Telp. 0751-7054806 Fax. 0751-40537**

 **Padang - Sumatera Barat 25179**

 ***e-mail : keuangan@pta-padang.go.id***

*KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Padang Periode Triwulan III Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku Koordinator Wilayah 005.04.0800. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

 Padang, 10 Februari 2025 2019

Penanggung Jawab Korwil 005.04.0800

**Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag.**

 NIP. 197007021996031005

*DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

[Kata Pengantar ii](#_Toc148780605)

[Daftar Isi iv](#_Toc148780606)

[Daftar Tabel dan Lampiran vii](#_Toc148780607)

[Pernyataan Tanggung Jawab ix](#_Toc148780608)

[Ringkasan 1](#_Toc148780609)

[I. Laporan Realisasi Anggaran 5](#_Toc148780610)

[II. Neraca 7](#_Toc148780611)

[III. Laporan Operasional 10](#_Toc148780612)

[IV. Laporan Perubahan Ekuitas 13](#_Toc148780613)

[V. Catatan atas Laporan Keuangan 15](#_Toc148780614)

[A. Penjelasan Umum 15](#_Toc148780615)

[A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Padang 15](#_Toc148780616)

[A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 16](#_Toc148780617)

[A.3. Basis Akuntansi 17](#_Toc148780618)

[A.4. Dasar Pengukuran 17](#_Toc148780619)

[A.5. Kebijakan Akuntansi 18](#_Toc148780620)

[B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran 27](#_Toc148780621)

[B.1. Pendapatan 27](#_Toc148780622)

[B.2. Belanja 28](#_Toc148780623)

[C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 31](#_Toc148780624)

[D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 38](#_Toc148780625)

[D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 38](#_Toc148780626)

[D.2. Beban Persediaan 38](#_Toc148780627)

[D.3. Beban Barang dan Jasa 39](#_Toc148780628)

[D.4. Beban Pemeliharaan 40](#_Toc148780629)

[D.5. Beban Perjalanan Dinas 40](#_Toc148780630)

[D.6. Kegiatan Non Operasional 41](#_Toc148780631)

[E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 42](#_Toc148780632)

[E.1. Ekuitas Awal 42](#_Toc148780633)

[E.2. Surplus/ (Defisit) LO 42](#_Toc148780634)

[E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas 42](#_Toc148780635)

[E.4. Transaksi Antar Entitas 42](#_Toc148780636)

[E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) 43](#_Toc148780637)

[E.4.2 Transfer Masuk / Transfer Keluar 43](#_Toc148780638)

[E.5. Ekuitas Akhir 44](#_Toc148780639)

[F. Pengungkapan Penting Lainnya 45](#_Toc148780640)

[F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca 45](#_Toc148780641)

[F.2. Pengungkapan Lain-lain 45](#_Toc148780642)

[F.2.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK 45](#_Toc148780643)

[F.2.2. Rekening Pemerintah 45](#_Toc148780644)

[F.2.3. Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ke-3 45](#_Toc148780645)

[F.2.4. Revisi DIPA 49](#_Toc148780646)

[F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB 52](#_Toc148780647)

[F.2.6. Penggantian Pejabat Perbendaharaan 52](#_Toc148780648)

[F.2.7. Monitoring Aplikasi SAKTI & MONSAKTI 53](#_Toc148780649)

*DAFTAR TABEL*

# Daftar Tabel dan Lampiran

[Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 dan 2023 1](#_Toc180156176)

[Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 2](#_Toc180156177)

[Tabel 3 Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA 17](#_Toc180156178)

[Tabel 4 Penggolongan Kualitas Piutang 20](#_Toc180156179)

[Tabel 5 Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 23](#_Toc180156180)

[Tabel 6 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 25](#_Toc180156181)

[Tabel 7 Revisi Anggaran per 31 Desember 2024 27](#_Toc180156182)

[Tabel 8 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2024 28](#_Toc180156183)

[Tabel 9 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2024 dan 2023 28](#_Toc180156184)

[Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 29](#_Toc180156185)

[Grafik 11 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 29](#_Toc180156186)

[Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 29](#_Toc180156187)

[Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 2023 30](#_Toc180156188)

[Tabel 14 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 31](#_Toc180156189)

[Tabel 15 Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 32](#_Toc180156190)

[Tabel 16 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 33](#_Toc180156191)

[Tabel 17 Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 34](#_Toc180156192)

[Tabel 18 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada Satuan Kerja per 31 Desember 2024 35](#_Toc180156193)

[Tabel 19 Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN pada satker 37](#_Toc180156194)

[Tabel 20 Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 38](#_Toc180156195)

[Tabel 21 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 38](#_Toc180156196)

[Tabel 22 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 39](#_Toc180156197)

[Tabel 23 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023 40](#_Toc180156198)

[Tabel 24 Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 2023 40](#_Toc180156199)

[Tabel 25 Perbandingan Nilai Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023 41](#_Toc180156200)

[Tabel 26 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2024 42](#_Toc180156201)

[Tabel 27 Perbandingan DDEL dan DKEL per 31 Desember 2024 dan 2023 43](#_Toc180156202)

[Tabel 28 Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2024 per satuan keja 43](#_Toc180156203)

[Tabel 29 Daftar Revisi per 31 Desember 2024 50](#_Toc180156204)

[Tabel 30 Penggantian Pejabat Perbendaharaan pada per 31 Desember 2024 52](#_Toc180156205)

Lampiran I Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/ Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap

Lampiran II Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Lampiran III Tabel Hibah

*PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

**Pengadilan Tinggi Agama Padang**

**Jl. By Pass Km 24 Anak Air Padang Padang - Sumatera Barat 25179**

 **Telp. 0751-7054806 Fax. 0751-40537 e-mail : keuangan@pta-padang.go.id**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Pernyataan Tanggung Jawab

Penggabungan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode Tahunan tahun 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

 Padang, 10 Februari 2025 2019

Penanggung Jawab Korwil 005.04.0800

**Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag.**

 NIP. 197007021996031005

*RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran,Neraca,dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal,dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan UAPPA-W Pengadilan Tinggi Agama Padang Periode Trwulan III Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan Belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024*.*

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar 739,390,700 atau mencapai 68.67 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 1,076,708,000.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2024 adalah sebesar 2,395,116,520 atau mencapai 86.07 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2,785,500,000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 dan 2023

*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** |  **TA 2024**  |  **TA 2023** |
|  | **Anggaran** | **Realisasi** | **% real. Thd anggaran** | **Realisasi** |
| **Pendapatan Negara**  | **1,076,708,000** | **1,004,890,200** | **93.33** | **950,755,000** |
|  **Belanja Negara** | **2,780,028,000** | **2,738,668,140** | **98.51** | **2,504,229,781** |

1. **NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar 33,392,401 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 33,392,401 Aset Tetap (bersih) sebesar Rp. 0, Piutang Jangka Panjang (bersih) sebesar Rp.0 dan Aset Lainnya sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas disajikan masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 33,392,401.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Periode Neraca** | **Kenaikan/Penurunan** |
| **31 Desember 2024** | **31 Des 2023** | **Rp.** | **%** |
| **Aset** |  |  |  |  |
|  **Aset Lancar** | **33,392,401** | **24,955,504** | **8,436,897** | **33.81** |
|  **Aset Tetap** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
|  **Aset Lainnya** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **Jumlah Aset** | **33,392,401** | **24,955,504** | **8,436,897** | **33.81** |
| **Kewajiban** |  |  |  |  |
|  **Kewajiban Jangka Pendek** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
|  **Kewajiban Jangka Panjang** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **Jumlah Kewajiban** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **Ekuitas** |  |  |  |  |
|  **Ekuitas** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **Jumlah Ekuitas** | **33,392,401** | **24,955,504** | **8,436,897** | **33.81** |
| **Jumlah Kewajiban dan Ekuitas** | **33,392,401** | **24,955,504** | **8,436,897** | **33.81** |

1. **LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1,004,900,200 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 2,770,385,243 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 1,765,485,043. Kegiatan Non Operasional defisit sebesar Rp.0 dan Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami defisit -LO sebesar 1,765,485,043.

1. **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 24,955,504 dikurangi defisit -LO sebesar Rp. 1,765,485,043 kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 1,773,921,940 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 33,392,401.

1. **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

1. *LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023**

***( dalam satuan Rupiah*)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Uraian** | **Catatan** | **TA 2024** | **TA 2023** |
| **Anggaran**  | **Realisasi** | **%**  | **Realisasi** |
| **A.** | **Pendapatan Negara dan Hibah** | **B.1** |  |  |  |  |
| **1.** | **Penerimaan Negara Bukan Pajak** | **B.1.1** | **1,076,708,000** | **1,004,890,200** | **93.33** | **950,755,000** |
|  | **Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah** |  | **1,076,708,000** | **1,004,890,200** | **93.33** | **950,755,000** |
| **B.** | **Belanja Negara** | **B.2** |  |  |  |  |
| **1.** | **Belanja Pegawai** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **Belanja Barang** |  | **2,780,028,000** | **2,738,668,140** | **98.51** | **2,504,229,781** |
| **3.** | **Belanja Modal** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Jumlah Belanja Negara** |  | **2,780,028,000** | **2,738,668,140** | **98.51** | **2,504,229,781** |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

1. *NERACA PERBANDINGAN*

# II. Neraca

 **PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**NERACA**

**PER 31 Desember 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **Catatan** | **31 Desember 2024**  | **31 DESEMBER 2023** |
| **ASET** |  |  |  |  |
| **Aset Lancar** | **C.1** |  |  |  |
| **Kas dan Bank** |  |  |  |  |
|  | **Kas di Bendahara Penerimaan** | **C.1.** |  | **10,000** | **0** |
|  | **Kas Lainnya dan Setara Kas** | **C.1.** |  | **0** | **0** |
|  | **Persediaan** | **C.1.** |  | **33,382,401** | **24,955,504** |
|  | **Jumlah Aset Lancar** |  |  | **33,392,401** | **24,955,504** |
|  | **Jumlah Aset** |  |  | **33,392,401** | **24,955,504** |
| **KEWAJIBAN** |  |  |  |  |
| **Kewajiban Jangka Pendek** | **C.2** |  |  |  |
|  **Utang kepada pihak ketiga** | **C.2** | **1.** | **0** | **0** |
|  **Utang yang Belum Ditagihkan** | **C.2** | **2.** | **0** | **0** |
|  **Uang Muka dari KPPN** | **C.2** | **3.** | **0** | **0** |
| **Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**  |  |  | **0** | **0** |
| **Jumlah Kewajiban**  |  |  | **0** | **0** |
| **EKUITAS** |  |  |  |  |
| **Ekuitas** | **C.3** |  |  |  |
|  **Ekuitas** | **C.3** | **1** | **33,392,401** | **24,955,504** |
| **Jumlah Ekuitas** |  |  |  **33,392,401** | **24,955,504** |
| **Jumlah Kewajiban dan Ekuitas** |  |  | **33,392,401** | **24,955,504** |
|  |  |  |  |  |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

1. *LAPORAN OPERASIONAL*

# III. Laporan Operasional

 **PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**LAPORAN OPERASIONAL**

**PER 31 Desember 2024 DAN 2023**

***(dalam satuan Rupiah)***

| **Uraian** | **Catatan** | **31 Desember 2024** | **30 September 2023** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan Operasional** |  |  |  |  |
| **PENDAPATAN** |  |  |  |  |
| **Penerimaan Negara Bukan Pajak** | **D.** | **1** | **1,004,900,200** | **950,755,000** |
| **JUMLAH PENDAPATAN** |  |  | **1,004,900,200** | **950,755,000** |
| **BEBAN** |  |  |  |  |
|  | **Beban Pegawai** |  |  | **0** | **0** |
|  | **Beban Persediaan**  | **D.** | **2** | **108,306,103** | **93,301,666** |
|  | **Beban Barang dan Jasa**  | **D.** | **3** | **1,152,318,900** | **1,146,906,271** |
|  | **Beban Pemeliharaan** | **D.** | **4** | **0** | **0** |
|  | **Beban Perjalanan Dinas**  | **D.** | **5** | **1,509,760,240** | **1,292,784,500** |
|  | **Beban Barang U/Diserahkan kpd Masyarakat** |  |  | **0** | **0** |
|  | **Beban Penyusutan dan Amortisasi** |  |  | **0** | **0** |
|  | **JUMLAH BEBAN** |  |  | **2,770,385,243** | **2,532,992,437** |
|  | **Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional** |  |  | **(1,765,485,043** | **(1,582,237,437)** |
| **Kegiatan Non Operasional**  |  |  |  |  |  |
|  | **SURPLUS/ (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR** |  |  |  |  |
|  | **Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar** |  |  | **0** | **0** |
|  | **Beban Pelepasan Aset Non Lancar** |  |  | **0** | **0** |
|  | **JUMLAH SURPLUS/ (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR** |  |  | **0** | **0** |
|  | **SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA** |  |  |  |  |
|  | **Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya** |  |  | **0** | **0** |
|  | **Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya** |  |  | **0** | **5.378.655** |
|  | **JUMLAH SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA** |  |  | **0** | **(5.378.655)** |
|  | **Jumlah Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional**  | **D.6** |  |  | **(5.378.655)** |
|  | **Surplus/ (Defisit) Laporan Operasional Sebelum Pos Luar Biasa** |  |  | **(1,765,485,043)** | **(1,587,616,092)** |
|  | **Pos Luar Biasa** |  |  | **0** | **0** |
|  | **Surplus/ (Defisit) Laporan Operasional** |  |  | **(1,765,485,043)** | **(1,587,616,092)** |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

1. *LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

# IV. Laporan Perubahan Ekuitas

 **PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**PER 31 Desember 2024 DAN 2023**

***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Catatan** | **31 Desember 2024** | **30 September 2023** |
| **Ekuitas Awal** | **E.** | **1** | **24,955,504** | **30.766.152** |
| **Surplus/ (Defisit) Laporan Operasional** | **E.** | **2** | **(1,765,485,043)** | **(1,587,616,092)** |
| **Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas**  |  **E.** | **3** | **0** | **0** |
| **Penyesuaian Nilai Aset** |  |  | **0** | **0** |
| **Koreksi Nilai Persediaan** |  |  | **0** | **0** |
| **Transaksi Antar Entitas**  | **E.** | **4** | **1,773,921,940** | **1,581,805,444** |
| **Kenaikan/Penurunan Ekuitas** |  |  | **8,436,897** | **(5,810,648)** |
| **Ekuitas Akhir** | **E.** | **5** | **33,392,401** | **24,955,504** |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

1. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

# V. Catatan atas Laporan Keuangan

## Penjelasan Umum

### Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Padang

Pengadilan Tinggi Agama Padang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dia juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya. Tugas pokok peradilan agama berdasarkan undang-undang tersebut adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang berkomitmen dengan visi:

***“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Padang yang Agung.”***

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan langkah-langkah strategis berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara.
2. Meningkatkan akseptibilitas putusan hakim.
3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan.
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatkan kualitas pengawasan.
7. Meningkatkan kualitas SDM.

### Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementrian Negara/lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul- modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran;
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul ,yaitu modul Komitmen( meliputi sub-modul Manajeman Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran;
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Keuangan Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Triwulan III Tahun 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Pengadilan Tinggi Agama Padang yang meliputi wilayah serta satuan kerja kode Eselon 04 (Badan Peradilan Agama) yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah 19 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut berikut:

Tabel 3 Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

| No | KodeWil | Uraian Satker | Jumlah Jenis Kewenangan | Jumlah Satker |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KP** | **KD** | **DK** | **TP** |
|  |  |  |  |
| 1 | **0800** | **Pengadilan Tinggi Agama Padang** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 |
| 2 | **0800** | **Pengadilan Agama Pariaman** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 |
| 3 | **0800** | **Pengadilan Agama Solok** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 |
| 4 | **0800** | **Pengadilan Agama Sawahlunto** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 |
| 5 | **0800** | **Pengadilan Agama Pulau Punjung** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 |
| 6 | **0800** | **Pengadilan Agama Batusangkar** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 |
| 7 | **0800** | **Pengadilan Agama Padang** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 |
| 8 | **0800** | **Pengadilan Agama Padang Panjang** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 |
| 9 | **0800** | **Pengadilan Agama Sijunjung** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 |
| 10 | **0800** | **Pengadilan Agama Koto Baru** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 |
| 11 | **0800** | **Pengadilan Agama Muara Labuh** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 |
| 12 | **0800** | **Pengadilan Agama Painan** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 |
| 13 | **0800** | **Pengadilan Agama Bukittinggi** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 |
| 14 | **0800** | **Pengadilan Agama Lubuk Sikaping** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 |
| 15 | **0800** | **Pengadilan Agama Talu** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 |
| 16 | **0800** | **Pengadilan Agama Maninjau** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 |
| 17 | **0800** | **Pengadilan Agama Payakumbuh** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 |
| 18 | **0800** | **Pengadilan Agama Tanjung Pati** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 |
| 19 | **0800** | **Pengadilan Agama Lubuk Basung** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 |
| Jumlah | - | 19 | - | - | 19 |

### Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut:

#### Pendapatan-LRA

* 1. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
	2. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
	3. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### Pendapatan-LO

* Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
* Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada UAPPA-W Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan yang diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa dan penerimaan kembali persekot/uang muka gaji.
* Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
* Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

####  Belanja

* Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
* Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
* Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
* Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

####  Beban

* Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
* Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
* Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

####  Aset

* Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
* Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### Aset Lancar

* Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
* Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
* Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
* Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Penggolongan Kualitas Piutang

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
| --- | --- | --- |
| Lancar | **Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo** | **0.5%** |
| Kurang Lancar | **Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan** | **10%** |
| Diragukan | **Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan** | **50%** |
| Macet | 1. **Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan**
2. **Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN**
 | **100%** |

* Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
* Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
* Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
* harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### Aset Tetap

* Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
* Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
* Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*);
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
* Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat , tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
* Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/ BMD.

#### c. Penyusutan Aset Tetap

* Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2018 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
* Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
	+ - 1. Tanah
			2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
			3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
* Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
* Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
* Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

|  |  |
| --- | --- |
| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
| Peralatan dan Mesin | **2 s.d. 20 tahun** |
| Gedung dan Bangunan | **10 s.d. 50 tahun** |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | **5 s.d. 40 tahun** |
| Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) | **4 tahun** |

####  Piutang Jangka Panjang

* Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
* TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
* TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
* TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### Aset Lainnya

* Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) , dan kas yang dibatasi penggunaannya.
* Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
* Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
* Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan nomor 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

|  |  |
| --- | --- |
| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (tahun) |
| Softwate computer | **4** |
| Franchise | **5** |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasian Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | **10** |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim | **20** |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | **25** |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram | **50** |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I | **70** |

* Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### Kewajiban

* Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
* Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
	1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

* 1. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

* Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Satuan Kerja dilingkungan Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian usulan estimasi pendapatan dengan DIPA, adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut:

**Tabel 7 Revisi Anggaran per 31 Desember 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **URAIAN** | **2024** |
| **ANGGARAN AWAL** | **ANGGARAN SETELAH REVISI** |
| **Pendapatan** |  |  |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak | 1,076,708,000 | 1,076,708,000 |
| **Jumlah Pendapatan** | **1,076,708,000** | **1,076,708,000** |
|  |  |  |
| **Belanja** |  |  |
| Belanja Pegawai | 0 | 0 |
| Belanja Barang | 2,640,450,000 | 2,780,028,000 |
| Belanja Modal | 0 | 0 |
| **Jumlah Belanja** | **2,640,450,000** | **2,780,028,000** |

Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kode Eselon 04 (Badan Peradilan Agama) tidak terdapat Belanja Pegawai dan Belanja Modal, hanya terdapat Belanja Barang yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Peradilan Agama dalam memutus suatu perkara.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pendapatan |
| *Realisasi Pendapatan :* *Rp 1,004,890,200* | Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1,004,890,200 atau mencapai 93.33 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar 1,076,708,000. Keseluruhan Pendapatan Negara yang diterima oleh lingkup Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya tersaji pada Tabel berikut : |
|  | Tabel 8 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2024***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** |  **Uraian** | **Estimasi Pendapatan** | **Realisasi** | **%** |
| 1.
 | **Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan** | **5,570,000** | **0** | **0** |
| 1.
 | **Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)** | **23,320,000** | **15,810,000** | **67.8** |
| 1.
 | **Pendapatan Ongkos Perkara** | **363,925,000** | **356,625,000** | **97.99** |
| 1.
 | **Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya** | **683,893,000** | **632,455,200** | **92.48** |
|  | **Total Pendapatan** | **1,076,708,000** | **1,004,890,200** | **93.33** |

 |
|  |  |
|  | Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 54,135,200 atau 5.69% persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan perkara tahun 2024 lebih banyak dari pada tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi PNBP per 30 September TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini:Tabel 9 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2024 dan 2023***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **TA 2024** |  **TA 2023** | **Perubahan** |
| Rp. | % |
| 1.
 | **Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan** | **0** | **290,000** | **-290,000** | **-100.00%** |
| 1.
 | **Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)** | **15,810,000** | **9,100,000** | **6,710,000** | **73.74%** |
| 1.
 | **Pendapatan Ongkos Perkara** | **356,625,000** | **343,920,000** | **12,705,000** | **3.69%** |
| 1.
 | **Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya** | **632,455,200** | **597,445,000** | **35,010,200** | **5.86%** |
|  | **Total Pendapatan** | **1,004,890,200** | **950,755,000** | **54,135,200** |  **5.69%** |

 |
|  | Belanja |
| *Realisasi Belanja Negara : Rp 2,395,116,520* | Realisasi Belanja Negara pada lingkup Pengadilan Agama Padang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 2,395,116,520 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 86.07 persen dari anggaran senilai Rp. 2,785,500,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 September TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Uraian** | **31 Desember 2024**  |
| **Pagu** | **Realisasi** | **%** |
|  **Belanja Pegawai** | **0** | **0** | **0,00** |
|  **Belanja Barang** | **2,785,500,000** | **2,741,243,050** | **98.6** |
|  **Belanja Modal** | **0** | **0** | **0,00** |
|  **Total Belanja Bruto** | **2,785,500,000** | **2,741,243,050** | **98.6** |
|  **Pengembalian Belanja** | **0** | **2,574,910** | **0.08** |
|  **Total Belanja Netto** | **2,785,500,000** | **2,738,668,140** | **98.6** |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :Grafik 11 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024*(dalam satuan Rupiah)*Realisasi belanja per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 3.7 persen dibandingkan realisasi belanja pada 30 September 2023. Hal ini disebabkan adanya penambahan pagu belanja barang tahun 2024 lebih banyak dari pada tahun sebelumnya.Perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2024 | TA 2023 | Naik (Turun) |
| **Rp**  | **%** |
|  Belanja Pegawai | **0** | **0** | 0 | 0, |
|  Belanja Barang | **2,738,668,140** | **2,504,229,781** | **234,438,359** | **9.36** |
|  Belanja Modal | **0** | **0** | **0** | **0,** |
| Total Belanja | **2,738,668,140** | **2,504,229,781** | **234,438,359** | **9.36** |

 |
|  | Belanja Barang |
| *Realisasi Belanja Barang : Rp 2,738,668,140* | Realisasi Belanja Barang pada lingkup Pengadilan Tinggi Agama Padang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 2,738,668,140 dan Rp. 2,504,229,781.Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 234,438,359 atau sebesar 9.36 persen dari realisasi tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh pagu anggaran yang lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 2023*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **TA 2024** | **TA 2023** | **Perubahan** |
|  | **Realisasi** | **Realisasi** | **Rp.** | **%** |
|  **Belanja Barang Operasional** | **4,073,000** | **0** | **4,073,000** | **∞** |
|  **Belanja Barang Non Operasional** | **45,049,500** | **52,614,111** | **-7,564,611** | **-14.38%** |
|  **Belanja Barang Persediaan** | **49,517,000** | **57,393,510** | **-7,876,510** | **-13.72%** |
|  **Belanja Jasa** | **998,807,150** | **995,896,700** | **2,910,450** | **0.29%** |
|  **Belanja Perjalanan Dinas** | **1,283,118,28** | **1,203,689,00** | **7,942,928** | **6.60%** |
| **Total Belanja Brutto** | **2,397,435,430** | **2,309,593,321** | **87,842,109** | **3.80%** |
| **Pengembalian Belanja** | **2,318,910** | **0** | **2,318,910** | **∞** |
| **Total Belanja Netto** | **2,395,116,520** | **2,309,593,321** | **85,523,199** | **3.70%** |

Pengembalian belanja sebesar 2,318,910 adalah pengembalian belanja jasa sebesar Rp.17,000 dan belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2,301,910. |

## Penjelasan atas Pos-pos Neraca

|  |  |
| --- | --- |
|  | Aset Lancar |
| *Aset Lancar: Rp 617,847,143* |  Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 617,847,143 dan Rp. 24,955,504.Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.Rincian Aset Lancar pada lingkup Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel di bawah :Tabel 14 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uraian | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | **21,960,000** | **0** |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | **542,638,019** | **0** |
| Persediaan | **53,249,124** |  **24,955,504** |
| Jumlah Total | **617,847,143** | **24,955,504** |

 |
|  | Kas di Bendahara Pengeluaran |
| *Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp 21,960,000* | Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 21,960,000 dan Rp. 0. Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/ TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.Rincian posisi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:Tabel 15 Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | 31 Desember 2024 | 31 Des 2023 | Rp Naik/ (Turun) | % Naik/ (Turun) |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | **21,960,000** | **0** | **21,960,000** | **∞** |
| Kas di Bendahara Pengeluaran TUP | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Jumlah | **21,960,000** | **0** | **21,960,000** | **∞** |

Satuan kerja yang memiliki saldo Kas di Bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah :Pengadilan Agama Sawahlunto sebesar Rp. 5,100,000.;Pengadilan Agama Batusangkar sebesar Rp. 660,000.;Pengadilan Agama Padang Panjang sebesar Rp. 4,000,000.Pengadilan Agama Sijunjung sebesar Rp. 1,200,000..Pengadilan Agama Koto Baru sebesar Rp. 4,000,000.Pengadilan Agama Bukittinggi sebesar Rp. 4,000,000. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sebesar Rp.3,000,000.  |
|  | Kas Lainnya dan Setara Kas |
| *Kas Lainnya dan Setara Kas:* *Rp 542,638,019* | Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 542,638,019 dan Rp.0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi-investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut : Tabel 16 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uraian | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 |
| Kas Lainnya di Bendahara PengeluaranKas Lainnya di Bendahara Penerimaan |  **0****542,638,019** |  **00** |
| Total | **542,638,019** | **0** |

Kas Lainnya dan Setara Kas ini berupa Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan Dana Titipan Pihak Ketiga dalam berperkara di Peradilan Agama yang terdapat pada:1. Pengadilan Tinggi Agama Padang sebesar Rp 150,000.
2. Pengadilan Agama Pariaman sebesar Rp 28,809,000.
3. Pengadilan Agama Solok sebesar Rp 17,171,400.
4. Pengadilan Agama Sawahlunto sebesar Rp 10,000.
5. Pengadilan Agama Pulau Punjung sebesar Rp 33,086,500
6. Pengadilan Agama Batusangkar sebesar Rp 11,808,000.
7. Pengadilan Agama Padang sebesar Rp 196,792,500.
8. Pengadilan Agama Padang Panjang sebesar Rp 11,317,000.
9. Pengadilan Agama Sijunjung sebesar Rp 20,758,500.
10. Pengadilan Agama Koto Baru sebesar Rp 15,579,100.
11. Pengadilan Agama Muara Labuh sebesar Rp 14,046,001.
12. Pengadilan Agama Painan sebesar Rp 46,962,100.
13. Pengadilan Agama Bukittinggi sebesar Rp 22,338,358.
14. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sebesar Rp 384,560.
15. Pengadilan Agama Talu sebesar Rp 83,631,000.
16. Pengadilan Agama Maninjau sebesar Rp 4,059,000.
17. Pengadilan Agama Payakumbuh sebesar Rp 19,690,000.
18. Pengadilan Agama Tanjung Pati sebesar 8,618,500.
19. Pengadilan Agama Lubuk Basung sebesar Rp 7,426,500.
 |
|  | Persediaan |
| *Persediaan:* *Rp 53,249,124* | Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 53,249,124 dan Rp 24,955,504. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:Tabel 17 Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 |
|  | **Barang Konsumsi** | **53,249,124** | **24,955,504** |
|  | **Bahan Untuk Pemeliharaan** | **0** | **0** |
|  | **Total** | **53,249,124** | **24,955,504** |

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan senilai Rp 53,249,124, dimana semua dalam kondisi baik. |
|  | Kewajiban Jangka Pendek |
|  | C.2.1 Utang kepada Pihak Ketiga |
| *Utang kepada Pihak Ketiga:**Rp 550,838,019* | Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 550,838,019 dan Rp. 0. .Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada satuan kerja di lingkup Pengadilan Tinggi Agama Padang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:Tabel 18 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada Satuan Kerja per 31 Desember 2024***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Satker** | **Uraian** | **Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar** | **Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya** | **Dana Pihak Ketiga** | **Total Utang Kepada Pihak Ketiga** |
| **401901** | **PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG** | **0** | **0** | **150,000** | **150,000** |
| **401917** | **PENGADILAN AGAMA PARIAMAN** | **0** | **0** | **36,009,000** | **36,009,000** |
| **401922** | **PENGADILAN AGAMA SOLOK** | **0** | **0** | **17,171,400** | **17,171,400** |
| **401931** | **PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO** | **0** | **0** | **10,000** | **10,000** |
| **401947** | **PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR** | **0** | **0** | **11,808,000** | **11,808,000** |
| **401953** | **PENGADILAN AGAMA PADANG** | **0** | **0** | **197,792,500** | **197,792,500** |
| **401962** | **PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG** | **0** | **0** | **11,317,000** | **11,317,000** |
| **401978** | **PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG** | **0** | **0** | **20,758,500** | **20,758,500** |
| **401984** | **PENGADILAN AGAMA KOTO BARU** | **0** | **0** | **15,579,100** | **15,579,100** |
| **401990** | **PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH** | **0** | **0** | **14,046,001** | **14,046,001** |
| **402004** | **PENGADILAN AGAMA PAINAN** | **0** | **0** | **46,962,100** | **46,962,100** |
| **402010** | **PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI** | **0** | **0** | **22,338,358** | **22,338,358** |
| **402029** | **PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING** | **0** | **0** | **384,560** | **384,560** |
| **402035** | **PENGADILAN AGAMA TALU** | **0** | **0** | **83,631,000** | **83,631,000** |
| **402041** | **PENGADILAN AGAMA MANINJAU** | **0** | **0** | **4,059,000** | **4,059,000** |
| **402050** | **PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH** | **0** | **0** | **19,690,000** | **19,690,000** |
| **402066** | **PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI** | **0** | **0** | **8,618,500** | **8,618,500** |
| **402613** | **PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG** | **0** | **0** | **7,426,500** | **7,426,500** |
| **401936** | **PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG** | **0** | **0** | **33,086,500** | **33,086,500** |
| **JUMLAH** | **0** | **0** | **550,838,019** | **550,838,019** |

Dana pihak ketiga pada semua satuan kerja merupakan panjar biaya perkara yang masih dalam proses berperkara. |
|  | C.2.2 Utang Yang Belum Ditagihkan |
| *Utang Yang Belum Ditagihkan**Rp.* *4,687,000* | Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,687,000 dan Rp 0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Pada periode 31 Desember 2024 akun ini terdapat pada * + 1. Pengadilan Agama Sawahlunto sebesar Rp. 533,000 merupakan kwintansi persediaan yang belum di SPJ kan;
		2. Pengadilan Agama Batusangkar sebesar Rp.264,000 merupakan kwitansi prodeo yang belum di SPJ kan;
		3. Pengadilan Agama Padang Panjang sebesar Rp 3,130,000 merupakan kwintansi SPD, Prodeo, dan Konsumsi yang belum diSPJ kan;
		4. Pengadilan Agama Bukittinggi sebesar Rp. 760,000 merupakan kwintansi SPD Sidang Keliling yang belum diSPJkan;

  |
|  | C.2.3 Uang Muka dari KPPN |
| *Uang Muka dari KPPN:* *Rp 21,960,000* |  Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 21,960,000dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar. Adapun rincian Uang Muka dari KPPN per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :Tabel 19 Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN pada satker ***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kode Satker** | **Uraian** | **Nilai****Jumlah** |
| 401931 | PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO | 5,100,000 |
| 401947 | PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR | 660,000 |
| 401962 | PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG | 4,000,000 |
| 401978 | PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG | 1,200,000 |
| 401984 | PENGADILAN AGAMA KOTO BARU | 4,000,000 |
| 402010 | PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI | 4,000,000 |
| 402029 | PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING | 3,000,000 |
| **JUMLAH** | **21,960,000** |

 |
|  | Ekuitas |
| *Ekuitas:**Rp 40,362,124* | Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 40,362,124 dan Rp. 24,955,504. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.  |

|  |
| --- |
| Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional |
|  Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| *Pendapatan PNBP : Rp 739,390,700* | Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 739,390,700 dan Rp. 712,250,000. Pendapatan tersebut terdiri dari:Tabel 20 Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **TA 2024**  |  **TA 2023** | **Perubahan** |
| Rp. | % |
|  | **Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan** | **0** | **260,000** | **-260,000** | **-100.00%** |
|  | **Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)** | **11,630,000** | **5,820,000** | **5,810,000** | **99.83%** |
|  | **Pendapatan Ongkos Perkara** | **275,450,000** | **266,135,000** | **9,315,000** | **3.50%** |
|  | **Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya** | **452,310,700** | **440,035,000** | **12,275,700** | **2.79%** |
|  | **Total Pendapatan** | **739,390,700** | **712,250,000** | **27,140,700** | **3.81%** |

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang kode Eselon 04 (Badan Peradilan Agama) merupakan pendapatan dari setoran perkara yang ada pada Peradilan Agama. |
|  Beban Persediaan |
| *Beban Persediaan : Rp 78,617,880* | Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 78,617,880 dan Rp72,223,491. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: Tabel 21 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2024 | TA 2023 | Naik (Turun) % |
|  Beban Persediaan konsumsi  | **78,617,880** | **72,223,491** | **8.85%** |
|  Total Beban Persediaan | **78,617,880** | **72,223,491** | **8.85%** |

 |
|  Beban Barang dan Jasa |
| *Beban Barang dan Jasa : Rp 1,056,112,650.* | Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing - masing sebesar Rp. 1,056,112,650 dan Rp 1,056,363,375. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: Tabel 22 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2024 | TA 2023 | Naik (Turun) % |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | **4,073,000** | **0** | ∞ |
| Beban Bahan | **45,049,500** | **33,069,500** | **36.23%** |
| Beban Jasa Konsultan | **987,055,150** | **1,001,046,700** | **-1.40%** |
| Pengembalian Beban Jasa Konsultan | **-17,000** | **0** | ∞ |
| Beban Sewa | **900,000** | **450,000** | **100.00%** |
| Beban Jasa Lainnya | **19,052,000** | **21,797,175** | **-12.59%** |
|  Total Beban Barang dan Jasa | **1,056,112,650** | **1,056,363,375** | **-0.02%** |

 |
|  Beban Pemeliharaan |
| *Beban Pemeliharaan: Rp 0* | Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:Tabel 23 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2024 | TA 2023 | Naik (Turun) % |
| Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan | **0** | **0** | **0** |
|  Total Beban Pemeliharaan | **0** | **0** | **0** |

 |
| Beban Perjalanan Dinas |
| *Beban Perjalanan Dinas : Rp 1,285,123,370.* | Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1,285,123,370 dan Rp. 1,212,853,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:Tabel 24 Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 2023*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2024 | TA 2023 | Naik (Turun) % |
| Beban Perjalanan Dinas Biasa | **345,188,400** | **343,415,500** | **0.52%** |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | **898,746,880** | **821,327,500** | **9.43%** |
| Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | **-1,261,910** | **0** | ∞ |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | **23,330,000** | **7,170,000** | **225.38%** |
| Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota  | **-1,040,000** | **0** | ∞ |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | **20,160,000** | **40,940,000** | **-50.76%** |
|  Total Beban Perjalanan Dinas | **1,285,123,370** | **1,212,853,000** | **5.96%** |

 |
| Kegiatan Non Operasional |
| *Kegiatan non Operasional :* *Rp.* *0* | Pos Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:Tabel 25 Perbandingan Nilai Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2024 | TA 2023 | Naik (Turun) % |
| Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar | **0** | **0** | **0** |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | **0** | **0** | **0** |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | **0** | **0** | **0** |
| Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya | **0** | **5,378,655** | **-100.00%** |
| Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya | **0** | **0** | **0** |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | **0** | **5,378,655** | **-100.00%** |
|  Total Surplus/ (Defisit) dari kegiatan Non Operasional | **0** | **5,378,655** | **-100.00%** |

﻿Pendapatan/ Beban Penyesuaian Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga PeroLehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO). |

|  |
| --- |
| Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas |
| Ekuitas Awal |
| *Ekuitas Awal : Rp 24,955,504* | Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 24,955,504dan Rp. 30,766,152. |
| Surplus/ (Defisit) LO |
| *Surplus(defisit) LO : Rp 1,680,463,200)*  | Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(1,680,463,200)dan Rp.( 1,634,568,521). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. |
| Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas |
| *Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas:**Rp.* *0* | Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pada periode 31 Desember 2024 ini tidak ada koreksi yang menambah ataupun mengurangi ekuitas. |
| Transaksi Antar Entitas |
| *Transaksi Antar Entitas : Rp 1,695,869,820* | Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1,695,869,820 dan Rp. 1,625,673,984. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 26 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2024*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |
| --- | --- |
| Transaksi Antar Entitas | Nilai |
| Ditagihkan ke Entitas Lain  | 2,395,116,520 |
| Diterima dari Entitas Lain | -739,390,700 |
| Transfer Masuk | -40,144,000. |
| Transfer Keluar | 80,288,000. |
| Jumlah | **1,695,869,820** |

 |
| E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) |
| *Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL):**Rp -739,390,700 Rp.* *2,395,116,520* | Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp -739,390,700 sedangkan DKEL sebesar Rp. 2,395,116,520Sedangkan perbandingannya per tahun dapat dilihat pada tabel berikut:Tabel 27 Perbandingan DDEL dan DKEL per 31 Desember 2024 dan 2023*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2024 | TA 2023 |
| DDEL | -739,390,700 | -712,250,000 |
| DKEL | 2,395,116,520 | 2,309,593,321 |
| Jumlah | **1,655,725,820** | **1,597,343,321** |

 |
|  E.4.2 Transfer Masuk / Transfer Keluar |
| *Transfer Masuk/Transfer Keluar:**Rp.* *80,288,000/ Rp-40,144,000*  | Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 80,288,000 dan Rp -40,144,000. Sedangkan Transfer masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 56,661,326 dan Rp. -28,330,663.Berikut rincian transfer masuk per 31 Desember 2024 pada setiap satuan kerja, terdiri dari:Tabel 28 Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2024 per satuan keja *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KODE SATKER** | **NAMA SATKER** | **NILAI** |
| 401901 | PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG | 40,144,000. |
| 401917 | PENGADILAN AGAMA PARIAMAN | 4,992,000. |
| 401923 | PENGADILAN AGAMA SOLOK | 1,872,000. |
| 401932 | PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO | 624,000. |
| 401948 | PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR | 2,496,000. |
| 401954 | PENGADILAN AGAMA PADANG | 3,120,000. |
| 401963 | PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG | 1,248,000. |
| 401979 | PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG | 1,456,000. |
| 401985 | PENGADILAN AGAMA KOTO BARU | 4,160,000. |
| 401991 | PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH | 624,000. |
| 402005 | PENGADILAN AGAMA PAINAN | 2,496,000. |
| 402011 | PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI | 4,160,000. |
| 402030 | PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING | 1,040,000. |
| 402036 | PENGADILAN AGAMA TALU | 1,664,000. |
| 402042 | PENGADILAN AGAMA MANINJAU | 1,040,000. |
| 402051 | PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH | 4,160,000. |
| 402067 | PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI | 2,080,000. |
| 402614 | PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG | 1,872,000. |
| 403400 | PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG | 1,040,000. |
| **TOTAL** | **80,288,000** |

 |
|  | Transfer Masuk pada peradilan agama per 31 Desember 2024 merupakan akta cerai yang diterima satuan kerja per 22 Mei 2024. Sedangkan transfer keluar terjadi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebesar Rp 40,144,000 sebagai penerima awal Akta Cerai dari Badan Peradilan Agama. |
| Ekuitas Akhir |
| *Ekuitas Akhir : Rp 40,362,124* | Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 40,362,124 dan Rp. 21,871,615.  |

## Pengungkapan Penting Lainnya

### Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### Pengungkapan Lain-lain

### Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Pada 31 Desember 2024, BPK tidak ada melakukan audit terhadap Satuan Kerja dilingkungan Korwil Sumatera Barat.

### Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional lingkup Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebanyak 19 rekening. Dimana masing-masing satker mengelola satu rekening bendahara pengeluaran dan satu rekening titipan pihak ketiga.

### Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ke-3

##### Penjelasan Umum

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Lembaga Yudikatif dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengelola keuangan anggaran bersumber dari Anggaran Belanja Negara yang dalam institusi pemerintah lebih dikenal dengan keuangan DIPA.
2. Selain keuangan DIPA, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya juga mengelola biaya proses penyelesaian perkara yang bersumber dari para pihak berperkara atau lebih dikenal dengan uang titipan pihak ketiga. Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa untuk proses penyelesaian perkara perdata tidak dibolehkan lagi menggunakan fasilitas yang bersumber dari keuangan yang ada dalam DIPA.
3. Uang titipan pihak ketiga (pihak berperkara) ini merupakan uang persediaan yang digunakan khusus untuk membiayai penyelesaian perkara selama proses pesidangan berlangsung dan semata mata hanya dibolehkan digunakan khusus untuk perkara tertentu (mereka sendiri). Biaya proses penyelesaian perkara yang merupakan uang titipan pihak ketiga ini digunakan untuk mendukung penyelesaian perkara diantaranya biaya pemanggilan para pihak berperkara, saksi saksi, biaya pemberitahuan, biaya penyitaan dan biaya biaya lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkata tersebut.
4. Hal ini merupakan konsekuensi logis yuridis bahwa dalam perkara perdata, biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada para pihak berperkara, yang pada awal proses dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan/permohonan, termasuk pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dan tidak dibebankan kepada negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara kecuali bagi mereka yang tidak mampu (perkara prodeo) dan dalam perkara gugatan di Pengadilan Hubungan Industri.
5. Pengelola uang titipan pihak ketiga pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar yakni:
6. Uang Titipan Pihak ketiga sebagai Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara, dan
7. Uang Titipan Pihak ketiga lainnya.

##### Informasi Keadaan Uang Titipan Pihak Ketiga sebagai Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara

##### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
6. HIP (Herzein Inlandch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44/RBG (Reglement Tot Regeling Van Her Rechswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227)
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya.
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

#### Definisi Biaya Perkara Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

1. Biaya Perkara menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya.

Biaya perkara adalah biaya yang dipergunakan langsung untuk melaksanakan proses perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding.

1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara

1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

**Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses** adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.

#### Kewajiban Pengungkapan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Biaya proses penyelesaian perkara dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan, dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam CaLK Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

#### Kebijakan Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

* 1. Pengelolaan (pengadministrasian) biaya proses penyelesaian perkara (titipan pihak ketiga) ini terpisah dari pengelolaan (pengadministrasian) biaya yang ada dalam APBN yang tertuang dalam DIPA. Penanggungjawab pengelolaan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau Pengadilan Tingkat Banding adalah Panitera/Sekretaris.
	2. Prosedur pembayaran biaya proses penyelesaian perkara harus dibayarkan oleh para pihak berperkara dengan cara langsung menyetor sendiri ke bank persepsi Pengadilan setempat setelah sebelumnya oleh Petugas Meja 1 dilakukan tentang penaksiran besarnya biaya proses dalam perkara tersebut.
	3. Rekening bank biaya proses ini terpisah dari rekening bank pengelolaan keuangan dalam APBN yang ada dalam bendahara pengeluaran. Hampir semua biaya proses perkara ini tersimpan di bank persepsi, sebagian kecil disimpan dalam brankas bendahara biaya proses yang digunakan sebagai uang persediaan untuk keperluan proses penyelesaian perkara. Besarnya pengeluaran biaya untuk proses penyelesaian perkara ini sesuai dengan tahapan persidangan/pemeriksaan perkara dan manakala uang persediaan untuk proses penyelesaian perkara ini kurang maka bendahara biaya proses akan mengambil kembali uang yang ada pada rekening bank persepsi.
	4. Disamping biaya proses, terhadap para pihak berperkara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, juga dibebani untuk membayar biaya PNBP sebagai pemasukan pemerintah.
	5. Oleh karena biaya proses ini merupakan titipan dari pihak berperkara yang digunakan sebagai biaya operasional selama proses persidangan perkara berlangsung, maka apabila ternyata sebelum perkara selesai biaya proses tersebut kurang, kepada pihak yang mengajukan perkara diperintahkan kembali untuk manambah biaya proses perkara. Namun apabila setelah pemeriksaan perkara selesai dan sudah tidak ada lagi kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian dan telah ternyata biaya proses dimaksud terdapat sisa biaya, maka sisa biaya tersebut dikembalikan kepada pihak berperkara.
	6. Apabila ternyata pihak berperkara tidak datang untuk mengambil sisa biaya proses dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak diberitahukan kepada para pihak setelah perkara diputusan, maka sisa biaya proses tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP.

Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga pada satuan kerja di lingkup korwil Pengadilan Tinggi Agama Padang TA. 2024 dapat dilihat pada Data Dukung Laporan Keuangan ini.

### Revisi DIPA

Berikut uraian Revisi satker yang terjadi dari tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024:

**Tabel 29 Daftar Revisi per 31 Desember 2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no | *Satker* | *Revisi Ke* | *Tanggal* | *Digital Stamp* | *Keterangan* |
| 1 | PTA Padang | 1 | 7/2/2024 | 2928-3363-1032-2610 | Perubahan hal III DIPA |
| 2 | 17/04/2024 | 2928-3363-1032-2610 | Perubahan hal III DIPA  |
| 3 | 23/04/2024 | 2928-3363-1032-2610 | Perubahan hal III DIPA |
| 4 | 29/05/2024 | 2928-3363-1032-2610 | Perubahan hal III DIPA  |
| 5 | 11/7/2024 | 2928-3363-1032-2610 | Perubahan hal III DIPA  |
| 6 | 7-Aug-24 | 9349-0834-7707-5350 | - Penambahan Anggaran Koordinasi & Bimtek Pengelolaan PNBP dan Perubahan Halaman III DIPA  |
| 2 | PA Pariaman | 1 | 05 Februari 2024 | 4842-7964-6553-0736 | Revisi Halaman 3 |
| 2 | 2-Apr-24 | 4842-7964-6553-0736 | Revisi Halaman 3 |
| 3 | 04 Juli 2024 | 4842-7964-6553-0736 | Revisi Halaman 3 dan POK |
| 3 | PA Solok | 1 | 13-02-2024 | 5540-8028-0875-0235 | Revisi Hal III DIPA |
| 2 | 17-04-2024 | 5540-8028-0875-0235 | Revisi Hal III DIPA |
| 3 | 31-05-2024 | 5540-8028-0875-0235 | Revisi Hal III DIPA |
| 4 | 2/7/2024 | 5540-8028-0875-0235 | Revisi Hal III DIPA |
| 4 | PA Sawahlunto | 1 | 2/6/2024 | 0906 9084 3700 8397 | Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA |
| 2 | 4/4/2024 | 907 9084 3700 8397 | Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA |
| 5 | PA Pulau Punjung | 1 | 20/02/2024 | DS:0850-1750-8685-1698 | Revisi Halaman III DIPA |
| 2 | 4/4/2024 | DS:0850-1750-8685-1698 | Revisi Halaman III DIPA |
| 6 | PA Batusangkar | 1 | 12/2/2024 | DS:7942-7987-9651-4204 | Perubahan Hal III DIPA |
| 2 | 2/4/2024 | DS:7942-7987-9651-4204 | Perubahan Hal III DIPA |
| 3 | 21/05/2024 | DS:7942-7987-9651-4204 | Perubahan Hal III DIPA |
| 4 | 3/7/2024 | DS:7942-7987-9651-4204 | Perubahan Hal III DIPA |
| 7 | PA Padang | 1 | 6/2/2024 | DS:7942-7987-9651-4204 | merupakan Perubahan Rencana Penarikan Anggaran hal III DIPA |
| 2 | 3/4/2024 | 6703-1081-8955-6757 | merupakan Perubahan Rencana Penarikan Anggaran hal III DIPA |
| 3 | 21/05/2024 | 6703-1081-8955-6757 | merupakan Perubahan Rencana Penarikan Anggaran hal III DIPA |
| 4 | 2/7/2024 | 6703-1081-8955-6757 | merupakan Perubahan Rencana Penarikan Anggaran hal III DIPA |
| 8 | PA Padang Panjang | 1 | 5/2/2024 |   | Revisi Halaman III DIPA |
| 2 | 2/4/2024 | 8955-6757 | Revisi Halaman III DIPA |
| 3 | 31/05/2024 | 8504-3456-8870-2505 | Revisi Halaman III DIPA |
| 4 | 4 Juli 2024 | 4907 1245 5332 9805 | Revisi Halaman III DIPA |
| 5 | 8 Agustus 2024 | 1429 4453 4646 1801 | Revisi Halaman III Dipa dan Revisi Antar Satker |
| 6 | 9/10/2024 | 2554 3859 3706 7722 | Revisi Halaman III Dipa dan Revisi Antar Satker |
| 9 | PA Sijunjung | 1 | 12 Juni 2024 | 0025-8049-0238-0687 | Revisi POK dan Revisi Hal III |
| 2 | 5 Juli 2024 | 0025-8049-0238-0687 | Revisi POK dan Revisi Hal III |
| 3 | 20-Sep-24 | 0025-8049-0238-0687 | Revisi POK dan Revisi Hal III |
| 10 | PA Kotobaru | 1 | 13 Februari 2024 | 1013 8668 1388 7488 | Revisi Halaman III Dipa |
| 2 | 23-Apr-24 | 1013 8668 1388 7488 | Revisi Halaman III Dipa |
| 3 | 11 Juli 2024 | 1013 8668 1388 7488 | Revisi Halaman III Dipa |
| 4 | 27 Agustus 2024 | 1013 8668 1388 7488 | Revisi Halaman III Dipa |
| 11 | PA MuaraLabuh | 1 | 15-Feb-24 | 8841 7202 4259 8202 | Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA |
| 2 | 05 Apr 0202 | 8841 7202 4259 8202 | Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA |
| 3 | 3-Jun-24 | 8841 7202 4259 8202 | Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA |
| 4 | 11-Jul-24 | 8841 7202 4259 8202 | Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA |
| 12 | PA Painan | 1 | 5-Apr-24 | 6031 9410 0600 9229 | Revisi Halaman III Dipa |
| 2 | 01 juni 2024 | 6031 9410 0600 9229 | Revisi Halaman III Dipa |
| 3 | Rabu, Juli 10, 2024 | 6031 9410 0600 9229 | Revisi Halaman III DIPA |
| 13 | PA Bukittinggi | 1 | 05 Februari 2024 | 2774-5480-7478-3073 | Revisi Halaman III DIPA |
| 2 | 4-Apr-24 | 2774-5480-7478-3073 | Revisi Halaman III DIPA |
| 3 | 02 Juni 2024 | 3826-1680-0512-5900 | Revisi Halaman III DIPA |
|   |   | 4 | 04 Juli 2024 | 2774-5480-7478-3073 | Revisi Halaman IV DIPA |
| 14 | PA Lubuk Sikaping | 1 | 2/16/2024 | DS:8146-5583-0181-7188 | PerubahanHalaman III DIPA Penyesuaian RPD Bulanan |
| 2 | 22/04/2024 | DS:8146-5583-0181-7188 | PerubahanHalaman III DIPA Revisi POK |
| 3 | 28/06/2024 | DS:8146-5583-0181-7188 | Penyesuaian RPD Bulanan perubahan hal III DIPA |
|   | 19-07-2024 | DS:8146-5583-0181-7188 | Revisi Hal 3 DIPA |
|   | 4/10/2024 | DS:8146-5583-0181-7188 | Revisi POK |
| 15 | PA Talu | 1 | 7/2/2024 | 3436 9204 0614 0956 | Hal III DIPA dan Perobahan pejabat KPA |
| 2 | 19/04/2024 | 3436 9204 0614 0956 | Hal III DIPA |
| 16 | PA Maninjau | 1 | 6/2/2024 | 1026-7701-2605-7039 | PerubahanHalaman III DIPA Penyesuaian RPD Bulanan Pemutakhiran Data Hasil revisi POK  |
| 2 | 3/4/2024 | 1026-7701-2605-7039 | PerubahanHalaman III DIPA Penyesuaian RPD Bulanan Pemutakhiran Data Hasil revisi POK  |
| 3 | 5/7/2024 | 1026-7701-2605-7039  | PerubahanHalaman III DIPA Penyesuaian RPD Bulanan Pemutakhiran Data Hasil revisi POK  |
| 17 | PA Payakumbuh | 1 | 5 Februari 2024 | DS:7067-8970-1000-4549 | Revisi Hal III DIPA |
| 2 | 4-Apr-24 | DS:7067-8970-1000-4549 | Revisi Hal III DIPA |
| 3 | 28 Mei 2024 | DS:7067-8970-1000-4549 | Revisi Hal III DIPA |
| 4 | 1 Juli 2024 | DS:7067-8970-1000-4549 | Revisi Hal III DIPA |
| 18 | PA Tanjung Pati | 1 | 1-Apr-24 | DS: 0157-2745-1587-9033 | Perubahan hal III DIPA |
| 2 | 03 Juli 2024 | DS: 0157-2745-1587-9033 | Perubahan hal III DIPA |
| 19 | PA Lubuk Basung | 1 | 19 Februari 2024  | 0890-9118-7870-7823 | Perubahan nama detail belanja dari ATK dan Spanduk Kegiatan menjadi Spanduk Kegiatan Perubahan Halaman III DIPA  |
| 2 | 22-Apr-24 | 0890-9118-7870-7823 | Perubahan Halaman III DIPA |
| 3 | 01 Juni 2024 | 0890-9118-7870-7823  | Perubahan Halaman III DIPA |
| 4 | 23 Juli 2024 | 0890-9118-7870-7823 | Perubahan Halaman III DIPAPergeseran rincian anggaran dalam satu akun, satu kegiatan dan dalam satu satker yang sama |
| 5 | 06 Agustus 2024 | 0890-9118-7870-7823 | Perubahan Halaman III DIPAPergeseran rincian anggaran dalam satu akun, satu kegiatan dan dalam satu satker yang sama |

### Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada ralat SPM, SSBP, dan SSPB pada satker dilingkungan Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang per 31 Desember 2024.

### Penggantian Pejabat Perbendaharaan

Penggantian pejabat perbendaharaan pada satker dilingkungan Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 30 Penggantian Pejabat Perbendaharaan pada per 31 Desember 2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *No* | *Satker* | *Jabatan* | *Semula* | *Menjadi* | *Tanggal Penggantian* |
| 1 | Pengadilan Tinggi Agama Padang | Bendahara Penerimaan | Yova Nelindy | Efri Sukma | 29 Juli 2024 |
| 2 | Pengadilan Agama Padang | Bendahara Penerimaan | Novtri Nelli, S.H | Nisa Dewi Asmar, S.Kom, M.H | 1 Maret 2024 |
| 4 | PA Maninjau | KPA | Drs. Yultra Yunaidi | Afif Zainus Sya’roni, S.Kom., M.H.I | 1-Apr-24 |
| 5 | Pengadilan Agama Sawahlunto | Pejabat Pembuat Komitmen | Befi Ramadani, S.Kom | Dodi Safutra, S.Kom | 04 Juni 2024 |
| 6 | Pengadilan Agama Padang Panjang | BENDAHARA PENGELUARAN | R.A. FADILLAH ARIYANI, A.MD | SUCI FITTRAH INSANI, A.MD | 4-Sep-24 |
| 7 | Pengadilan Agama Lubuk SIkaping | Bendahara pengeluaran | Elva Yulia | Wahyu Sari |   |
| 8 | Pengadilan Agama Batusangkar | Staff pengelola | Tika, A.Md., A.B | Ilham Wahyudi | 8 Januari 2024 |
| Bendahara Pengeluaran | Nadatul Khaira Amril, S.Ap | Putri Monalisa, A.Md | 30 Juli 2024 |
| PPABP | Wira Akhdiana, S.E | Eka Putri A.Md., A.B |
| Staff Pengelola | Ilham Wahyudi | Wira Akhdiana, S.E |
| 6 | Pengadilan Agama Sijunjung | Kuasa Pengguna Anggaran | Windy Safitra, S.Kom | Windy Safitra, S.Kom | 1 Agustus 2024 |
| Pejabat Pembuat Komitmen | Windy Safitra, S.Kom | Nila Dwiva, S.E | 1 Agustus 2024 |
| Pejabat Penandatangan SPM | Selly Tria Amanda, A.Md.A.B | Selly Tria Amanda, A.Md.A.B | 1 Agustus 2024 |
| PPABP | Muhammad Rachim, S.Kom | Muhammad Rachim, S.Kom | 1 Agustus 2024 |
| 10 | Pengadilan Agama Payakumbuh | KPA | NURMIA LOCANA, S. Kom | NURMIA LOCANA, S. Kom | 02 Januari 2024 |
| PPK | NURMIA LOCANA, S. Kom | NURMIA LOCANA, S. Kom | 02 Januari 2024 |
| PPSPM | RAHMAIDA SUSRIANTI, S.HI | RAHMAIDA SUSRIANTI, S.HI | 02 Januari 2024 |
| BENDAHARA PENGELUARAN | RANI ANGGRAINI, S. Kom | YOSSA PERMATA HERAWAN, A.Md | 01 Maret 2024 |
| Petugas ABP | YOSSA PERMATA HERAWAN, A.Md | RANI ANGGRAINI, S. Kom | 01 Maret 2023 |
| PENGELOLA PNBP | ALIYA YUSTIFI RADVANDINI, S. HI | ALIYA YUSTIFI RADVANDINI, S. HI | 02 Januari 2024 |
| Pengelola DIPA | FAJRI HAYATUL MUKMIN, S.E | FAJRI HAYATUL MUKMIN, S.E | 02 Januari 2024 |

### Monitoring Aplikasi SAKTI & MONSAKTI

Pada monitoring aplikasi SAKTI dan MONSAKTI terdapat selisih/penyajian yang salah pada beberapa menu pada periode 31 Desember 2024. Untuk transaksi tersebut yang tidak dijelaskan pada pos Realisasi Anggaran, Pos Neraca, Pos LO dan Pos LPE, dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Monitoring Utang Yang Belum Diterima Tagihannya per 31 Desember 2024

Utang Yang Belum Diterima Tagihannya merupakan Transaksi pengeluaran terhadap Uang Persediaan yang telah dipertanggungjawabkan dalam bentuk SPBy tetapi belum dilakukan Revolving UP sebagaimana terlampir dalam LPJ Bendahara Pengeluaran.

Berikut rincian Utang Yang Belum Diterima Tagihannya per 30 September 2024 pada setiap satuan kerja :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *No* | *Kode Satker* | *Nama Satker* | *Nilai* |
| 1 | 401932 | PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO | - 533,000.00 |
| 2 | 401948 | PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR | - 264,000.00 |
| 3 | 401963 | PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG | -3,130,000.00 |
| 4 | 402011 | PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI | - 760,000.00 |